
**STRATEGI PERSONAL BRANDING PUAN MAHARANI SEBAGAI CUCU
BUNG KARNO & PUTRI MEGAWATI**

Rafifrian Evandio

Universitas Indonesia Depok, Indonesia

Email: rafifrian@gmail.com

*Correspondence

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Diterima : 29-06-2023 Direvisi : 19-07-2023 Disetujui : 20-07-2023</p> <hr/> <p>Kata kunci: Politisi Perempuan; Personal Branding; Puan Maharani; Cucu Bung Karno; Putri Megawati Soekarnoputri.</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan tentang strategi branding politisi perempuan dengan merujuk pada studi kasus strategi personal branding Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi sebagai “cucu Bung Karno” dan “putri Megawati Soekarnoputri”. Sosok Puan Maharani sendiri dikenal oleh publik Indonesia sebagai putri tunggal dari Megawati Soekarnoputri dengan suami ketiganya, Muhammad Taufiq Kiemas. Dengan statusnya tersebut, sosok Puan Maharani sering kali diasumsikan oleh berbagai kalangan sebagai suksesor dari trah atau keturunan Soekarno (Bung Karno) selaku kakeknya. Rampersad yang mengungkapkan bahwa setiap orang pada umumnya cenderung memiliki sebuah brand, namun sebagian besar orang tidak menyadarinya dan tidak mengelolanya secara strategis, konsisten, dan efektif. Bahkan, personal branding merupakan sintesis dari semua pengharapan, citra dan persepsi yang diciptakan dalam pemikiran orang lain sewaktu mereka membaca atau mendengar nama seseorang. Selain itu, Rampersad juga menyebutkan bahwa brand yang dimiliki oleh seseorang haruslah otentik; merefleksikan karakter yang sebenarnya; dan diciptakan berdasar pada nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang, keunggulan, keunikan, dan kemampuan orang tersebut. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi terhadap literatur-literatur yang relevan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi berhasil membangun personal branding sebagai salah satu sosok politisi perempuan yang berhasil terlibat dalam politik dengan turut didukung penggunaan citra sebagai “cucu Bung Karno” dan “putri Megawati Soekarnoputri” sebagai brand yang melekat pada dirinya.</p>
<p>Keywords: Female politician; Personal Branding; Puan Maharani; Granddaughter of Bung Karno; Daughter of Megawati Soekarnoputri.</p>	<p>ABSTRACT</p> <p><i>This research explains the branding strategies of female politicians, with a reference to the case study of the personal branding strategy of Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, who is known to the Indonesian public as the only daughter of Megawati Soekarnoputri and her third husband, Muhammad Taufiq Kiemas. With her status, Puan Maharani is often assumed by various groups as the successor to the legacy of her grandfather, Soekarno (Bung Karno). According to Rampersad, every individual generally has a brand, but most people are not aware of it and do not manage it strategically, consistently, and effectively. Personal branding is the synthesis of all the expectations, images, and perceptions created in the minds of others when they read or hear someone's name. Moreover, Rampersad emphasizes that a person's brand must be authentic, reflecting their true character and created based on their values, strengths, uniqueness, and abilities. The data for this research was obtained from secondary sources through a study of relevant literature. The results of this research show that Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi has successfully built a personal branding as a female politician who has been actively involved in</i></p>

politics, with the strategic use of the images "cucu Bung Karno" and "putri Megawati Soekarnoputri" as attributes closely associated with her brand.



Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Jika merujuk pada realitas politik Indonesia yang berkembang sejak bergulirnya Reformasi, dapat dilihat bahwa isu primordial merupakan salah satu identitas yang kerap kali digunakan oleh para politisi (Wati, 2021). Hal itu dikarenakan isu primordial kerap kali dijadikan oleh para politisi sebagai salah satu praktik politik identitas yang biasanya ditujukan untuk dapat meraih simpati dan dukungan dari masyarakat khususnya bagi yang memiliki kesamaan aspek primordial dengan politisi tersebut. Terkait dengan hal itu, istilah primordial sendiri secara teoritis berasal dari terminologi “primordialisme” yang jika merujuk pada perspektif dari Bayar (2009) dapat dipahami berdasarkan dua paradigma, yakni primordial dan konstruktivis (Wulandari, Zahro, & Sujoko, 2022). Dalam paradigma primordial, primordialisme dimaknai sebagai sebuah “keterikatan pribadi yang tak terbatas” dalam konteks masyarakat modern. Lebih lanjut, primordialisme turut dikaitkan dengan kondisi ketika seseorang berpikir tentang keterikatan relasi dengan orang lain tidak hanya didasarkan pada sebuah ikatan darah semata, melainkan sebagai kualitas “relasional signifikan” tertentu yang tidak hanya didasari pada proses interaksi sosial semata, melainkan karena ikatan darah dianggap memiliki makna tertentu yang tak dapat dilukiskan secara pasti (Susilo & Nisa, 2019).

Di samping itu, jika merujuk pada definisi yang terdapat dalam paradigma konstruktivis, primordialisme lebih dimaknai sebagai sebuah properti yang bersifat dinamis dan senantiasa berkembang baik dalam lingkup identitas individu maupun organisasi kelompok (AZIZ, 2021). Sementara itu, para penganut paradigma konstruktivis memiliki kesepahaman pada dua proposisi utama dari primordialisme, yakni bahwa seorang individu memiliki banyak identitas etnis (tidak tunggal) dan identitas yang diidentifikasi cenderung bervariasi karena disesuaikan dengan variabel kausal tertentu, seperti komposisi organisasi kelompok etnis tertentu hingga faktor demografis etnis (Habibi, 2019). Hal ini yang kemudian menjadi pembeda antara apa yang dipahami oleh para penganut paradigma primordial dengan konstruktivis di mana kaum konstruktivis meyakini bahwa primordialisme merupakan identitas yang variatif, sementara kaum primordial melihat hal tersebut sebagai identitas tunggal dengan banyak dimensi di dalamnya.

Dalam konteks di Indonesia, keberagaman identitas dalam peradaban masyarakat khususnya yang berlaku di tingkat lokal yang terdiri atas berbagai jenis suku, etnis, ras, bahasa, agama, hingga adat istiadat setidaknya dapat dimaknai ke dalam dua dimensi yang berbeda (Dewi, 2020). Pertama, adanya keberagaman tersebut secara konkret mencerminkan bahwa bangsa Indonesia dibangun di atas fondasi kebhinekaan dalam sebuah kerangka kebangsaan (nation) maupun kenegaraan (state) yang terintegrasi

secara nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kemudian dapat dimaknai sebagai cerminan dari sebuah multicultural *society* (Al Hamid, 2022). Sedangkan kedua, adanya keberagaman tersebut juga mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia relatif rentan dengan gejala atau sentimen kedaerahan hingga konflik horizontal maupun vertikal yang dapat berujung pada kekerasan dan perpecahan, baik itu dalam skala yang lebih kecil (disorganisasi) maupun skala yang lebih besar (disintegrasi) (Husain, 2021). Hal itu dikarenakan keberagaman tersebut justru menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan primordial sentiment karena masyarakat yang majemuk seperti Indonesia cenderung terbagi ke dalam sub-sub sistem yang masing-masing terikat dalam sebuah ikatan yang bersifat primordial.

Adanya primordial sentiment tersebut yang umumnya dijumpai dalam realitas perpolitikan di tingkat lokal, kemudian kerap dimanifestasikan dalam wujud sifat budaya dan tingkah laku politik pada konteks suku (tribe), daerah (region), agama, kelompok etnis, hingga pengelompokan-pengelompokan sejenis yang sifatnya askriptif, melekat, hingga “given”. Untuk itu, sekalipun memiliki sebuah identitas nasional yang sama dalam semangat kebangsaan dan kenegaraan, keberagaman dalam masyarakat Indonesia tidak serta merta dapat menegaskan bahwa setiap individu memiliki identitas primordial yang berbeda. Kemudian, dalam memahami adanya primordial sentiment atau primordial loyalty di tengah konteks keberagaman masyarakat Indonesia, argumen dari *Edward Shils* setidaknya dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk memperkuat pandangan *Clifford Geertz*. Menurutnya, di balik ikatan-ikatan kekeluargaan atau kekerabatan yang terdapat dalam tiap individu, terselip sebuah “relational qualities” yang kompleks dan haruslah dipahami sebagai primordial karena tidak hanya ditandai dalam sebuah fungsi interaksi semata, melainkan juga merujuk pada ikatan-ikatan darah (primordial bonds atau primordial attachment) sebagai cerminan dari properti kultural yang bersifat memaksa dan mengikat para anggotanya. Terlebih, hal tersebut juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Geertz dimana ikatan primordial juga dipandang olehnya sebagai sesuatu yang bersifat involunter dan memiliki daya paksa dalam mentrasedensi aliansi serta relasi yang dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya situasional maupun kondisi-kondisi sosial yang berlaku secara konkret.

Adapun jika dikaitkan dengan sosok Puan Maharani, setidaknya dapat dilihat dari bagaimana label sebagai bagian dari “trah Soekarno” kemudian kerap kali dilekatkan pada dirinya. Padahal, jika ditinjau berdasarkan sistem garis keturunan patrilineal, sosok Puan Maharani lebih cocok untuk dilabeli sebagai bagian dari trah keluarga Kiemas, marga Taufik Kiemas, sang ayah. Akan tetapi, label “trah Soekarno” nampaknya justru menjadi label (brand) yang lebih melekat kuat dalam diri Puan Maharani. Hal ini pun menjadi celah (gap) yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Apalagi, jika dikontekstualisasikan dengan momentum saat Puan Maharani mencalonkan diri dalam pemilu legislatif untuk pertama kalinya pada tahun 2009. Pada saat itu, dirinya berhasil meraih 242.504 suara dari daerah pemilihan Jawa Tengah V yang sekaligus menjadikannya sebagai caleg terpilih dengan suara terbanyak di peringkat ketujuh.

Kemudian, pada pemilu 2014, dirinya berhasil kembali terpilih dengan raihan sebanyak 369.927 suara yang membuatnya menempati peringkat kedua caleg terpilih yang memiliki suara terbanyak. Bahkan, pada pemilu 2019, Puan Maharani berhasil meraih posisi puncak dengan menempati peringkat pertama caleg terpilih peraih suara terbanyak dengan capaian 404.034 suara (Marina, 2019). Hal ini pun menunjukkan bahwa dalam setiap pemilu, tren perolehan suara yang berhasil diraih oleh Puan Maharani relatif mengalami kenaikan. Hingga kemudian menjelang pemilu serentak tahun 2024, mulai bertebaran baliho dan spanduk yang bertuliskan Puan Maharani sebagai “Cucu Bung Karno” dan “Putri Megawati Soekarnoputri” yang setidaknya mengindikasikan bahwa sang politisi mulai menggunakan identitas primordial sebagai strategi personal branding terhadap dirinya. Oleh karena itu, penelitian ini hendak melihat bagaimana penggunaan isu primordial melalui label sebagai “Cucu Bung Karno” dan “Putri Megawati Soekarnoputri” oleh Puan Maharani sebagai strategi personal branding dirinya.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai penunjang suatu penelitian yang ditujukan untuk menunjukkan seperangkat asumsi konseptual dan filosofis yang menjadi dasar justifikasi terhadap penggunaan suatu metode (Martono, 2015). Penelitian yang dikaji dalam tulisan ini merupakan penelitian sosial yang diharapkan mampu mengidentifikasi pertanyaan penelitian dan cara untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai temuan data yang diperoleh. Untuk memperoleh temuan berupa data yang dapat menjawab persoalan yang dibahas, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Creswell, metode kualitatif merupakan sebuah metode dalam penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengeksplorasi permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia maupun aspek-aspek sosial, sehingga tidak bias dengan proses generalisasi yang biasanya terjadi pada metode penelitian lainnya (Creswell, 2013). Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumentasi yang terdiri atas buku, jurnal, makalah seminar, skripsi, tesis, disertasi, laporan riset, koran, publikasi lembaga maupun internet dan sumber-sumber tertulis lainnya. Setelah itu, penelitian ini kemudian akan melakukan proses analisis data yang dapat didefinisikan sebagai proses pengorganisasian, penyusunan, pengurutan dan pengategorian data ke dalam suatu pola atau kategori untuk dapat dipahami maknanya. Dalam memahami makna dari data yang diperoleh, penelitian ini akan melakukan interpretasi terhadap setiap temuan yang ada agar dapat dikaitkan dengan persoalan yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Terpilihnya sosok Puan Maharani Nakshatra Kusyala atau yang kerap disebut Puan Maharani sebagai Ketua DPR-RI periode 2019-2024 telah mengukir sejarah baru kepemimpinan perempuan di Indonesia. Pasalnya, sejarah telah mendaulat Puan sebagai sosok perempuan pertama yang berhasil menjadi ketua DPR-RI. Meskipun

dalam konteks pimpinan DPR yang sifatnya kolektif-kolegial, tampilnya sosok Puan bukanlah menjadi sesuatu yang baru. Hal ini mengingat jauh sebelum terpilihnya Puan, DPR telah lebih dulu memiliki sosok pimpinan perempuan. Sosok yang dimaksud diantaranya adalah Fatimah Achmad yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua MPR/DPR periode 1997-1999 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) dan Khofifah Indar Parawansa yang menjabat Wakil Ketua DPR-RI bidang Industri, Perdagangan, dan Pembangunan sejak 6 Oktober 1999 hingga 28 Oktober 1999 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB).

Meskipun begitu, terpilihnya sosok Puan sebagai ketua DPR setidaknya dapat dianggap sebagai sebuah pencapaian besar yang berhasil ditorehkan bangsa Indonesia. Mengapa tidak? Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia telah berhasil menunjukkan pada khalayak dunia bahwa perempuan dapat tampil sebagai pemimpin. Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa ibunda Puan, Megawati Soekarnoputri yang merupakan putri sulung dari bapak proklamator Indonesia, Soekarno, merupakan presiden perempuan pertama Indonesia. Hal ini kemudian menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi segenap rakyat Indonesia bahwa di tengah proses transisi demokrasi yang masih berlangsung hingga kini, tampilnya sosok perempuan dalam jabatan politik yang otoritatif menjadi sebuah keniscayaan bahwa demokrasi Indonesia telah berjalan relatif mapan jika dibandingkan dengan banyak negara demokrasi lainnya.

Selain menjadi salah satu cerminan dari kemapanan demokrasi di Indonesia, tampilnya sosok Puan Maharani sebagai ketua DPR juga menjadi salah satu gambaran terhadap supremasi kaum perempuan. Hal ini didasari oleh pencapaian yang berhasil diraih Puan sejak debut pertama kalinya pada Pileg 2009, dimana ketika itu dirinya merupakan caleg yang berhasil memperoleh suara terbanyak kedua nasional setelah Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Pencapaian itu kemudian berhasil dipertahankan pada pemilu berikutnya di tahun 2014, meskipun harus berada di bawah rekan satu partainya sendiri yang kini menjadi Bupati Landak, yaitu Karolin Margret Natasha. Namun, karier politik Puan rupanya berhasil sampai ke titik puncak setelah rekapitulasi suara diselesaikan oleh KPU. Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, Puan merupakan caleg peraih suara tertinggi se-nasional dengan raihan sebanyak 404.034 suara dari daerah pemilihan Jawa Tengah V (Solo, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali). Pencapaian itu membuat Puan memiliki legitimasi yang kuat untuk menjadi perwakilan PDI-Perjuangan pada posisi pimpinan DPR. Apalagi, hal itu semakin mulus adanya setelah revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) mengembalikan ketentuan pengisian jabatan pimpinan DPR berdasarkan perolehan kursi terbanyak. Alhasil, karena PDI-Perjuangan berhasil keluar sebagai pemenang dengan capaian 128 kursi di DPR, menjadikan Puan yang merupakan salah satu pengurus DPP dapat dicalonkan menjadi pimpinan DPR.

Dengan terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua DPR yang baru, menarik kemudian untuk diulas lebih lanjut adalah menyangkut dengan sejauh mana hal itu dapat dimaknai sebagai harapan baru bagi perempuan Indonesia atau justru hanyalah merupakan simbolisme semata. Hal tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari

realitas politik yang menunjukkan bahwa besarnya biaya untuk maju dalam pemilu menjadi hambatan kandidat perempuan. "Terlalu besarnya modal yang harus dikeluarkan untuk bisa duduk ke bangku parlemen membuat perempuan memilih untuk tidak maju sebagai kandidat" ujar Rahayu Saraswati selaku peneliti CWI dalam wawancaranya dengan jurnal perempuan.

Sistem politik, pemilu dan kepartaian yang belum ramah terhadap perempuan menjadi problem yang perlu diperhatikan (Daniswara & Riwanto, 2021). Hasil penelitian CWI tahun 2019 mengenai perwakilan perempuan membuktikan bahwa partai politik cenderung menganggap bahwa pencalonan perempuan hanya untuk memenuhi kuota administratif. Perwakilan perempuan juga seringkali hanya dimaknai sebagai tabungan suara partai. Kebanyakan partai yang mengusung perempuan juga tidak turut memberikan penguatan kapasitas kader. Penelitian itu turut menekankan pada sisi paradoks dari kebijakan afirmatif pemilu. Tidak hanya secara sistem, namun budaya masyarakat yang masih patriarkis menjadi penghambat perempuan untuk terjun ke dunia politik. Kultur politik juga masih memperlihatkan maskulinitas, sehingga kebijakan relatif belum menyeluruh ramah terhadap perempuan.

Kebijakan yang sensitif terhadap kepentingan perempuan sebenarnya sudah cukup masif di Indonesia. Hal itu contohnya dapat dilihat dari kebijakan UU No. 23 tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU No. 12 tahun 2006 mengenai kewarganegaraan, UU No. 21 tahun 2007 mengenai pemberantasan perdagangan orang dan lain sebagainya. Hanya saja banyak kebijakan lain yang tumpang tindih dengan kemaslahatan perempuan. Beberapa hal lain turut luput dari regulasi pemerintah, seperti regulasi penjara perempuan. Kebijakan soal perempuan juga ada yang mengalami penangguhan seperti RUU PKS. Harapan Bagi Kebijakan Pro Perempuan?

Hadirnya sosok perempuan sebagai ketua parlemen turut memunculkan harapan baru. Eksistensi perempuan dalam parlemen penting dalam membenahi kebijakan mengenai perempuan. Hal itu tentu karena kesamaan pengalaman sebagai perempuan, sehingga memiliki preferensi yang senada, kemudian dapat menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan perempuan. "Semangat Kartini selalu menginspirasi kami meluaskan aspek pendidikan dan menekan angka buta huruf" kata Puan, dilansir dari Liputan6.com.

Kesimpulan

Adapun, dengan dilandaskan pada teori feminis mengenai keterwakilan perempuan yang diungkapkan oleh Anne Phillips, dapat dikatakan bahwa pentingnya political presence atau kehadiran sosok wakil yang memiliki kesamaan identitas dengan konstituen. Kesamaan identitas mempengaruhi kesamaan ide dalam pembuatan kebijakan. Seperti wakil perempuan berhak berbicara mengenai persoalan kepentingan perempuan. Walaupun teori itu tidak menjamin keterwakilan perempuan sepenuhnya bisa diwakili oleh identitas. Mengingat identitas seseorang saat ini tidak hanya satu.

Seperti pada sosok perempuan, tentu di masyarakat perempuan juga terbagi dalam kelas sosial yang berbeda kebutuhannya satu sama lain. Meskipun perempuan secara kodrat memiliki kebutuhan yang sama.

Bibliografi

- al Hamid, Rizal. (2022). Reinterpretation Of Understanding Pancasila And The Value Of Diversity Post-Reform Era: Reinterpretasi Pemahaman Pancasila Dan Nilai-Nilai Kebhinekaan Pasca Reformasi. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 31(1), 16–29. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v31i1.448>
- Aziz, Faadillah Irsyad. (2021). *Politik Identitas Komunitas KEPEMUDAAN (Studi Kasus Paguyuban Pemuda 13 di Perum Kertasari, Desa Sukamaju, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis)*. Universitas Siliwangi.
- Daniswara, Vani Oviana, & Riwanto, Agus. (2021). Keterwakilan Politik Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pemilu Tahun 2019 (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dikaitkan Dengan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perempuan). *Res Publica*, 5(1), 98–113. <https://doi.org/10.20961/respublica.v5i1.58448>
- Dewi, Putu Yulia Angga. (2020). Paradigma Inisiasi Kultural Ke Multikulturalisme. *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya*, 4(1), 33–46. <https://doi.org/10.55115/purwadita.v4i1.538>
- Habibi, Nadhir Muhammad. (2019). *Kritik Herbert Marcuse atas kategori eros milik Sigmund Freud: Studi Literatur*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Husain, Sulfitri. (2021). Problem Sosial Budaya. *Nuta Media*.
- Marina, Nurul Fitria. (2019). Peran Ruang Terbuka Hijau dalam Pembangunan Kota. *Prosiding Seminar Nasional Rekayasa Teknologi Dan Industri (ReTII) Ke-14*, 14(14), 473–478. Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.
- Susilo, Muhammad Edy, & Nisa, Nurul Latifatun. (2019). Strategi Komunikasi Politisi Perempuan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(1), 54–65. <https://doi.org/10.31315/jik.v16i1.2682>
- Wati, Widya. (2021). Menguatnya politik identitas di indonesia baik karena faktor agama, sosial, dan etnis. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(2), 66–87.
- Wulandari, Maulina Pia, Zahro, Maharina Novia, & Sujoko, Anang. (2022). Strategi Komunikasi Politik Politisi Perempuan Dalam Membangun Citra Pemimpin Perempuan (Analisis Naratif Gaya Komunikasi Politik Khofifah Indar Parawansa). *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(1), 26–49.